

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perubahan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut.

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan tujuan tersebut, menekankan bahwa pemerintah telah memiliki arah dan landasan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski kita tahu dengan pendidikan kita bisa mengubah semuanya, tetapi perlu diingat juga bahwasannya tahun demi tahun perkembangan zaman selalu berkembang terus-menerus, oleh karena itu diperlukan perubahan dan perkembangan dalam hal pendidikan, karena jika kita tetap saja pada apa yang ada dan tidak melakukan perubahan dan perkembangan maka sama saja kita

mengalami keterbelakangan peradaban dan kita akan tertinggal dengan semua yang ada di dunia ini yang serba menuntut perkembangan.

Upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan pada era globalisasi dilakukan dengan beberapa kebijakan oleh pemerintah, salah satunya pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembangkan potensi bagi penerus bangsa. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dilakukan agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Kurikulum menjadi sorotan utama bagi pengembangan pendidikan di Indonesia karena kurikulum merupakan hal mendasar yang diperlukan untuk merubah sistem pendidikan.

Kurikulum di Indonesia telah berganti beberapa kali yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan sekarang mulai diberlakukannya kurikulum 2013 walau hanya berlaku disekolah tertentu saja. Perubahan kurikulum ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada kurikulum sebelumnya yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP merupakan kurikulum yang dijalankan pemerintah pada tahun 2006, kurikulum ini merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Pergantian ini dimaksudkan untuk menghadapi persaingan global berbasis teknologi informasi. Salah satu upaya meningkatkan mutu lulusan adalah mulai diadakannya standar kelulusan.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 menjadi harapan bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 sudah direncanakan oleh pemerintah dengan berbagai tindakan. Adanya

pengembangan kurikulum ini diperlukan kesiapan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah maupun satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum ini. Kurikulum 2013 dimulai pada bulan Juli tahun ajaran 2013/2014 yang merupakan tahun ajaran baru bagi satuan pendidikan. Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan di beberapa sekolah diawali pada kelas I dan kelas IV SD/MI, kelas VII SMP/MTs, dan kelas X SMA/MA.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dengan adanya Kurikulum 2013 diharapkan adanya keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Elemen perubahan Kurikulum 2013 meliputi perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Perubahan dalam Kurikulum 2013 antara lain tentang pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba /mengumpulkan data, mengasosiasi /menalar, dan mengomunikasikan.

Penilaian hasil belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam pendidikan. Penilaian merupakan akhir dari proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar mempunyai peranan dalam peningkatan mutu pengajaran. Pelaksanaan penilaian harus intensif dan teratur supaya menumbuhkan kebiasaan belajar yang

baik bagi siswa. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan guru harus sesuai dengan standar penilaian yang diamanatkan pemerintah.

Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan dalam Kemendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Salah satu permasalahan dalam KTSP adalah standar penilaian pendidikan yang belum mengarah kearah penilaian berbasis kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

Pemberlakuan Kurikulum 2013 diharapkan dapat memperbaiki standar penilaian pendidikan yang proposional dan obyektif. Penilaian autentik merupakan penilaian yang di sebutkan dalam Permendiknas Nomor 66 Tahun 2013 yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik lebih mengukur keseluruhan hasil belajar siswa karena penilaian ini menilai kemajuan belajar siswa bukan hanya hasil akhir belajar siswa. Dengan adanya penilaian autentik guru dapat melakukan berbagai teknik penilaian untuk dapat mengukur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan.

Guru memiliki peran dan kedudukan yang cukup signifikan dalam proses penilaian, yakni orang yang mengetahui hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu dengan penilaian hasil belajar dapat diketahui

seberapa besar keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi atau materi yang telah diajarkan oleh guru.

Penilaian dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat keberhasilan atau efektivitas guru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus dilakukan dengan baik mulai dari penentuan instrumen, penyusunan instrumen, telaah instrumen, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian dan program tindak lanjut hasil penilaian. Penilaian hasil belajar yang baik akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam perbaikan kualitas proses belajar mengajar. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan dalam penilaian hasil belajar maka akan terjadi salah informasi tentang kualitas proses belajar mengajar dan pada akhirnya tujuan pendidikan tidak akan tercapai.

Jika seorang peserta didik dikatakan berhasil dalam belajarnya, maka keberhasilan itu haruslah diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan tujuan belajarnya atau kompetensi yang harus dicapainya. Informasi yang diperoleh dari penilaian harus komprehensif dan telah dilakukan pada saat-saat yang tepat selama dan setelah peserta didik belajar. Artinya pengukuran harus dilakukan sepanjang proses belajar yang dijalani peserta didik.

Pengukuran, penilaian dan evaluasi memiliki hubungan yang sangat terkait. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, dan pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi. Penilaian dilakukan sebelum pengukuran

karena pengukuran merupakan pemberian angka pada objek atau aturan yang memberikan arti kuantitatif.

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tingkat SMP yang dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2014 menunjukkan bahwa salah satu kesulitan guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 adalah dalam melaksanakan penilaian. Lebih dari 50% responden guru menyatakan bahwa mereka belum dapat merancang, melaksanakan, dan mengolah hasil penilaian dengan baik. Kesulitan yang utama adalah dalam merumuskan indikator, menyusun butir-butir instrumen dan melaksanakan penilaian sikap dengan berbagai macam teknik. Selain itu, banyak di antara guru yang kurang percaya diri dalam melaksanakan penilaian keterampilan. Mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana menyusun instrumen dan rubrik penilaian keterampilan.

Kesulitan umum lainnya yang dialami oleh para guru adalah dalam mengolah data penilaian dan melaporkan/menuliskan hasil penilaian dalam rapor. Kesulitan tersebut yang utama berkaitan dengan penulisan deskripsi capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Disamping itu, sejumlah guru mengaku bahwa mereka belum percaya diri dalam mengembangkan butir-butir soal pengetahuan. Mereka kurang memahami bagaimana merumuskan indikator dan menyusun butir-butir soal untuk pengetahuan faktual, konseptual, dan procedural yang dikombinasikan dengan keterampilan berfikir tingkat rendah hingga tinggi.

Permasalahan serupa juga banyak terjadi di SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Kota Binjai. SMP di Kota Binjai yang telah melaksanakan

Kurikulum 2013 berjumlah 6 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Binjai, SMP Negeri 3 Binjai, SMP Negeri 6 Binjai, SMP Negeri 9 Binjai, SMP Negeri 10 Binjai, dan SMP Negeri 11 Binjai. Keluhan yang sering dialami guru-guru khususnya guru PPKn yaitu kurangnya pemahaman mengenai cara mengaplikasikan penilaian autentik yang harus digunakan dalam kurikulum 2013.

Seperti wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa guru-guru yang ada di sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, mereka mengeluhkan mengenai sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yang dianggap sedikit membingungkan. Banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut diantaranya dalam penilaian sikap siswa, kendala yang dihadapi guru yaitu banyaknya siswa yang akan dinilai sikapnya sementara penilaian dilakukan perindividu. Disamping itu guru yang penulis wawancarai telah mendapat pelatihan kurikulum 2013 dan menurut mereka materi yang mereka dapatkan pada saat pelatihan telah mereka kuasai namun bila disesuaikan dengan buku kurikulum 2013 yang mereka peroleh dari sekolah ada perbedaan dalam hal penilaian siswa yang mereka anggap kurang mencerminkan karakteristik penilaian autentik.

Disamping permasalahan dilema karna isi buku yang kurang sesuai ada pula guru yang masi kurang memahami cara pengaplikasian penilaian autentik bagi siswa dengan alasan terlalu banyaknya aspek yang dinilai dalam penilaian autentik seiring dengan banyaknya siswa yang akan dinilai sehingga guru tersebut merasa bebannya terlalu berat untuk menjalankan penilaian autentik sesuai dengan pedoman penilaian yang telah dibuat mendikbud. Kurikulum 2013 merupakan

kurikulum baru yang memerlukan pengembangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Selain itu, juga perlu diketahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh sekolah agar dapat diperbaiki dan memperlancar pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tahap selanjutnya. Pelaksanaannya haruslah dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum tersebut telah dilaksanakan agar nantinya hal yang menghalangi kurikulum 2013 ini dapat di atasi dan mengalami kemajuan terutama untuk Kota Binjai dan daerah lain pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dispesifikan nantinya kepada penilaian autentik yang dilakukan Guru PPKn apakah pedoman yang diberikan menteri pendidikan dan kebudayaan sudah diaplikasikan dengan baik oleh guru khususnya guru mata pelajaran PPKn. Adapun judul penelitian ini “Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Pada Aspek Penilaian Autentik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMP Wilayah Kota Binjai”.

1.2 . Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Pada Aspek Penilaian Autentik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMP Wilayah Kota Binja, diantaranya :

1. Standar penilaian pendidikan pada KTSP yang belum mengarah kearah penilaian berbasis kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

2. Penilaian kompetensi siswa yang terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian ketrampilan masih dianggap sulit untuk dilaksanakan oleh guru.
3. Kurangnya kesiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 karena pelatihan yang kurang maksimal.
4. Kurangnya persiapan Guru sebelum proses penilaian dilakukan.
5. Guru sudah terbiasa hanya menilai aspek pengetahuan, sehingga aspek keterampilan dan sikap terabaikan.
6. Isi buku pedoman yang diberikan sekolah kurang mencerminkan karakteristik penilaian autentik, sehingga guru mengalami kebingungan dalam mengimplementasikannya.
7. Terlalu banyaknya aspek yang dinilai dalam penilaian autentik seiring banyaknya siswa yang akan dinilai.

1.3. Batasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian autentik sesuai Kurikulum 2013 cukup luas dan kompleks sehingga tidak dapat dikaji seluruhnya secara lengkap dalam penelitian ini. Oleh karena itu, maka penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi kurikulum 2013 pada aspek penilaian autentik yang terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Implementasi penilaian autentik perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah dengan adanya kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 penilaian hasil belajar yang mengharuskan guru melakukan penilaian autentik sudah benar-benar terlaksana dengan baik.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran PPKn di SMP wilayah Kota Binjai?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Guru PPKn dalam mengimplementasikan penilaian autentik sesuai dengan Kurikulum 2013 di SMP wilayah Kota Binjai?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi mengenai :

1. Menganalisis dan mendiskripsikan bagaimana implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran PPKn di SMP wilayah Kota Binjai.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan apa kendala-kendala yang dihadapi Guru PPKn dalam mengimplementasikan penilaian autentik sesuai dengan Kurikulum 2013 di SMP wilayah Kota Binjai.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan maupun peningkatan kualitas pembelajaran di SMP wilayah Kota Binjai.

1. Bagi dinas terkait: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengembangan maupun inovasi kurikulum yang sedang berjalan agar masalah-masalah yang ada pada saat ini tidak terjadi pada waktu yang akan datang.

2. Bagi kepala sekolah: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan supervisi kepada guru dalam mengimplementasi penilaian autentik pada Kurikulum 2013 serta dalam hal peningkatan mutu sekolah.
3. Bagi guru: hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penilaian autentik Kurikulum 2013 sehingga dapat memperkaya pemahaman guru dalam teori maupun praktiknya.
4. Memberikan referensi dan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan objek yang sama.